

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN PERSAMPAHAN ANORGANIK DI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**Khairiya Ulfa¹, Zakiyuddin², Onetusfisi Putra³, Susy Sriwahyuni⁴, Kiswanto⁵
Universitas Teuku Umar**

Email: ulfakhairiya634@gmail.com¹, zakiyuddin@utu.ac.id²

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat mencatat pada tahun 2023 jumlah sampah Kabupaten Aceh Barat mencapai 30,502.76 ton akibat dari masyarakat yang masih banyak menggunakan bahan dasar plastik untuk wadah makanan dan minuman yang akan menjadi sampah sulit didaur ulang sehingga berpotensi merusak keberlangsungan lingkungan, dan kesehatan manusia. Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap penanggulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik karena sampah adalah permasalahan yang bersingungan langsung dengan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan anorganik di Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara pada 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada indikator struktur organisasi dan disposisi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan pada indikator sarana prasarana dan komunikasi belum berjalan secara maksimal sebagai dampak dari masih kurangnya fasilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan anorganik belum cukup memadai karena masih ditemukan kendala pada indikator komunikasi dan sarana prasarana. Peneliti berharap agar Dinas Lingkungan Hidup di Aceh Barat lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi yang rutin tentang penanggulangan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan, serta pemerintah agar dapat menambah jumlah fasilitas yang masih belum cukup memadai.

Kata Kunci: Disposisi, Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Penanganan Sampah, Sarana Prasarana, Struktur Organisasi.

PENDAHULUAN

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan (Yunianti, 2023).

Sampah merupakan permasalahan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan, dan kesehatan manusia.. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap penaggulangan dan pengelolaan sampah yang lebih baik karena sampah adalah permasalahan yang bersingungan langsung dengan masyarakat (Purnomo, 2021). Adapun kategori sampah ada dua yaitu sampah organik dan anorganik, Sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, buah-buahan atau hijau lainnya, pengolahannya dapat dimanfaatkan secara langsung, tanpa melalui proses tertentu seperti pakan ternak dan kompos, sedangkan sampah anorganik berupa potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan anorganik lainnya, dapat di atasi dengan cara mengurangi penggunaannya atau bahkan di daur ulang (Zuraidah et al., 2022). Persoalan sampah dipemukiman perkotaan merupakan masalah serius yang mesti di pikirkan bersama-sama dalam mencari solusinya, perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya kemungkinan

karena pengetahuan tentang lingkungan yang belum baik. Perilaku masyarakat terbentuk sejak lama dan bertahan apabila didasarkan pada pengetahuan yang baik.

Setiap masyarakat yang tinggal dipertanian sejatinya menginginkan sebuah lokasi pemukiman yang layak dan nyaman sebagai wilayah pembangunan berkembang tentunya masyarakat kota mengharapkan memiliki lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Untuk mewujudkan dan menciptakan kota yang bersih, hijau, indah dan nyaman tidak terlepas dari kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah saling bahu membahu dan saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih tersebut (Rosyidie, 2019). Kegiatan untuk mewujudkan Kota yang bersih, hijau, indah dan nyaman, Dinas Lingkungan Hidup menjadi "leading sektor" dalam menangani kebersihan di Kota. Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam menangani sampah maka dirumuskan sebuah kebijakan yaitu PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah aturan pelaksanaan UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dalam PP 27 tahun 2020 ini tidak hanya dijelaskan tentang mengelola sampah tetapi bagaimana sampah tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis (Damanhuri, 2021).

Tahapan pengelolaan sampah adalah dengan pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Diperkirakan hanya 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang beroperasi utamanya adalah pengurungan (landfilling). Banyaknya sampah yang terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan berapa kali truk mengangkut sampah menuju TPA. Jarang diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah adalah permasalahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke saluran air (Damanhuri, 2021).

Pemerintah pusat sampai ke daerah Sudah melakukan Implementasi Kebijakan dalam pengurangan bahan plastik untuk wadah makanan dan minuman sebagai bentuk pengurangan sampah akan tetapi kebijakan tersebut hanya sebatas himbuan sehingga masyarakat tidak merespon kebijakan tersebut dengan positif (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023). Ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan keamanan dan pencemaran sampah dapat menimbulkan gangguan sebagai berikut; tumpukan sampah dapat menimbulkan kondisi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan yang normal biasanya dapat menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan PH tanah keadaan ini dapat mengganggu kehidupan sekitarnya sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena selama proses pembusukan menghasilkan gas-gas beracun, bau tak sedap, derah becek dan berlumpur terutama pada musim pengujan, Akan tetapi kekurangan O₂ yang diambil di udara sekitarnya sehingga menjadi mengganggu kehidupan flora dan fauna sekitarnya, tumpukan sampah menjadi media berkembang biak nya hewan pembawa penyakit terutama lalat, serangga, tikus, dan anjing. Secara estetika sampah dapat digolongkan sebagai bahan yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan lingkungan (Chandra, 2017).

Data timbunan sampah di Indonesia di tahun 2023 jumlah sampah Nasional mencapai 38.795.897,60 juta ton, jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah

organik yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastik yang mencapai 13 persen. (Dinas Lingkungan Hidup RI, 2023). Data timbunan sampah di Aceh di tahun 2023 jumlah sampah Provinsi Aceh mencapai 920.435,57 ton. (Dinas Lingkungan Hidup Aceh, 2023). Data timbunan sampah di Aceh Barat di tahun 2023 jumlah sampah Kabupaten Aceh Barat mencapai 30,502.76 ton. (Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, 2023). Kecamatan Johan Pahlawan adalah salah satu dari 12 Kecamatan di Kota Meulaboh-Aceh Barat yang berada di Provinsi Aceh dengan luas 2.927,95 km². Luas wilayah Kecamatan Johan Pahlawan adalah 44,91 km² dengan jumlah penduduk 63.975 jiwa (BPS Kota Meulaboh, 2020). Secara administratif Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 kelurahan. Kecamatan Johan Pahlawan memiliki kawasan pusat pasar dan pertokoan-tokoan dan di pasar ini sebahagian besar masyarakat melakukan transaksi perdagangan, Selain ini Kecamatan ini juga terdapat kawasan perhotelan yaitu Kelurahan Ujong Kalak. Beberapa lokasi strategis tersebut, selayaknya kebersihan patut untuk diberikan penanganan yang lebih khusus, hal inilah yang menjadi alasan dalam pembahasan transportasi pengangkutan mobil sampah di kota Meulaboh, khususnya Kecamatan Johan Pahlawan.

Saat ini landasan hukum tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kecamatan Johan Pahlawan mengacu pada Qanun Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan, tapi seluruh isi tersebut masih seputar tentang larangan, kewajiban, retribusi beserta sanksi yang melanggar. Di Kecamatan Johan Pahlawan perkembangan volume sampah makin meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan sehingga volume sampah sangat mempengaruhi kondisi TPA, Sampah yang di hasilkan di Kecamatan Johan Pahlawan adalah 52.378 kg/hari, dan yang dihasilkan per bulan 1.571.340 kg, jadi sampah yang dihasilkan tahun 2023 yaitu 19.954.070 kg. Adapun armada sampah berupa kendaraan dinas dan kecamatan 21 unit sedangkan kendaraan luar 8 unit. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA 60% sedangkan yang 40% tidak dapat teratasi, jumlah sampah yang tidak teratasi tersebut berada di sungai, drainase, dibakar dan lain-lain (Dinas Kebersihan Aceh Barat, 2023).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Johan Pahlawan didapatkan bahwa masyarakat masih banyak yang menggunakan bahan dasar palstik untuk wadah makanan dan minuman yang akan menjadi sampah yang sulit di daur ulang sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan persampahan Anorganik Di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 01-08 juli tahun 2024. Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu data primer berupa wawancara langsung terhadap informan dan data sekunder berupa hasil observasi dan hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, dan skripsi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dijadikan informan (Saftha et al., 2024). Didapatkan kriteria informan

dengan masa kerja yang telah lebih dari 3 tahun, bekerja dan berperan di penanganan persampahan anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Johan Pahlawan dan dapat dimintai informasi, sehingga didapatkan informan sebagai berikut:

Tabel 1. Informan

No	Status Informan	Umur	Masa Kerja	Jabatan/Posisi
1	Informan Utama	42 Tahun	5 tahun	Kenet/Pengangkut Sampah
2	Informan Utama	43 Tahun	4 tahun	Kenet/Pengangkut Sampah
3	Informan Utama	43 tahun	7 tahun	Driver/sopir
4	Informan kunci	44 tahun	7 tahun	Kabid Kebersihan
5	Informan Pendukung	57 tahun	4 tahun	Kepala dinas DLHK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana Prasarana

Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan sampah ?

IU1 : “Sementara sarana dan prasarana yang dibutuhkan memang masih perlu tambahan untuk sementara bisa dihandle dengan sarana dan prasarana yang telah ada”.

IU2 : “Ketersediaan sarana dan prasarana masih belum optimal dan perlu peningkatan lagi untuk memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang untuk”.

IU3 : “Ketersediaannya yang belum cukup, perlu adanya penambahan yang dibutuhkan penanganan persampahan”.

Apa saja sarana dan prasarananya?

IU1 : “Sarana dan prasarana nya mulai dari becak armada L300 5 unit armada stek 18 ambrol pengangkut tong sampah 4 buah dan di TPA juga menggunakan dua alat eskafator”.

IU2 : “Sarana armada trek sampah sekitar 18 unit dan ambrol sekitar 4 buah dan L300 5 unit dan juga menggunakan dua alat efakator”.

IU3 : “Sarana dan prasarana yang ada mobil L300 pengangkut tong sampah ada 4 dan 22 konteiner mobil armada trek 18 unit”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa sarana dan prasarana yang tersedia adalah becak armada L300, armada trek, dan ambrol pengangkut tong sampah.

Apa yang dibutuhkan tapi tidak ada?

IU1 : “Untuk saat ini sudah memadai sehingga semua sampah mulai dari kota sampai ke TPA dapat di kendali dengan baik”.

IU2 : “Untuk saat sudah bisa di katakan sudah memadai mulai dari kota-kota sampai ke TPA sudah bisa dikendalikan dengan baik”.

IU3 : “Untuk saat sudah bisa di katakan sudah memadai karena mulai dari kota-kota dan sampai ke TPA sudah bisa di katakan sudah dikendalikan dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa sarana dan prasarana sudah memadai tapi dari segi jumlahnya perlu ditingkatkan jumlah unitnya.

Bagaimana cara mengatasi pengurangan sampah.?

IU1 : “Sistem dalam pengurangan sampah mulai dari sistem pemilahan sudah di lakukan pengurangan sampah terutama sampah plastic mulai di lakukan pengurangan sehingga sampah-sampah seperti anorganik tidak berada lagi di TPA sudah dipilah dan menjadi bahan dari pada baik pengumpulan maupun pemulung menjadi peningkatan ekonomi”.

IU2 : “Sistem yang di lakukan dalam pengurangan sampah mulai dari sistem pemilahan sudah dilakukan dan juga sudah dilakukan pengurangan sampah terutama sampah-sampah plastic mulai di lakukan pengurangan sehingga sampah seperti sampah anorganik sudah tidak ada lagi di TPA sudah di pilah-pilah dan menjadi bahan-bahan dari pada baik pengumpulan maupun pemulung menjadi peningkatan ekonomi”.

IU3 : “Dalam pengurangan sampah dilakukan pemilahan sudah dilakukan terutama sampah-sampah plastic dan mulai di lakukan pengurangan sehingga sampah-sampah yang seperti sampah anorganik sudah tidak berada lagi di TPA dan sudah dipilah dan menjadi bahan dari pada pengumpul maupun pemulung menjadi nilai peningkatan ekonomi baik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa sudah melakukan pemilahan

Disposisi

Jika terjadi disposisi atau sikap kesenjangan dan hambatan dalam penanganan sampah anorganik apa saja yang dilakukan?

IU1 : “penanganan sampah tidak ada kendala karena semua armada dan tenaga kerja sudah diatur sesuai jalur masing masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun tidak terjadi rute yang tidak berjalan sudah sesuai dengan rute-rute sesuai armada yang telah ditentukan”.

IU2 : “sementara ini penanganan sampah tidak ada kendala karena semua armada trek dan tenaga kerja sudah diatur sesuai jalur prosedur masing-masing dan sudah berjalan sesuai rute nya masing-masing”.

IU3 : “Sementara ini penanganan sampah tidak ada kendala karena mulai dari armada trek sampah dan tenaga kerja mereka sudah di atur sesuai jalurnya masing-masing sehingga tidak terjadi yang namanya tumpang tindih pekerjaan maupun rute yang tidak berjalan sudah sesuai dengan rute armada yang telah di tentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa Tidak ada kendala dalam hal kesenjangan.

Struktur Organisasi

Adakah kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik sudah dijalankan sesuai prosedurnya ?

IK : “struktur organisasi ada kepala dinas dibawah nya sekretaris kemudian ada tiga bidang, yang pertama bidang umum, bidang PTL/limbah itu penataan dan tata lingkungan bidang kebersihan jadi itu sudah diterapkan”.

IP : “sudah di jalankan sesuai dengan prosedur yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa Sudah di jalankan sesuai dengan prosedur yang ada

Apa kebijakan yang sudah diterapkan sudah di jalankan baik oleh staff ?

IK : “Sebagian besar sudah yang sekarang disusun terkait dengan kebijakan pengelolaan persampahan adalah turunan terkait dengan turunan qanun no 4 tahun 2017 itu menyangkut perizinan pengelolaan kegiatan pengelolaan sampah ,mungkin kalian pasti tau orang memilih sampah seperti pemulung itu mengumpulkan satu tempat di ikat-ikat dibawa naik trek dibawa lagi ke Medan , jadi kedepan menyangkut perizinan dan akan diatur perizinannya itu yang harus dibuat dituangkan diperaturan bupati jadi ada qanun kalo di Aceh”.

IP : “Itu allhamdulillah di jalankan dan sudah berjalan dengan normal”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa sudah di jalankan dengan baik dan sudah berjalan dengan normal

Kapan diberlakukan kebijakan tersebut?

IK : “Itu udah dilakukan kebijakan tersebut mulai tahun ini sudah berjalan tetapi belum maksimal, itu perlu juga untuk turun kembali atau kembali sosialisasi sehingga masyarakat benar-benar mengerti dan taat terhadap aturan yang telah di keluarkan baik perbuk atau qanun terhadap persampahan yang berada diperkampungan baik di Kecamatan Johan pahlawan atau Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Aceh Barat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa sudah di jalankan dengan baik dan sudah berjalan dengan normal.

Komunikasi

Kendala apa saja yang terjadi dalam penanganan sampah anorganik?

IK : “Nah kendalanya itu yang pertama sekali partisipasi masyarakat yang masih kurang sehigga pada saat melakukan pengumpulan sampah disumber itu banyak masyarakat dia buang sampah tidak pada tempatnya misalnya tidak pada TPS, tidak dalam TPS, tidak di dalam container dan tidak di tong sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa Partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang sampah sehingga membuangnya secara sembarangan.

Pembahasan

Analisis Implementasi Struktur Dan Organisasi Dalam Penanganan Sampah

Menurut Edward III 1980 terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah rutinitas yang memungkinkan pejabat publik untuk membuat keputusan yang berurutan. Pertimbangan menggunakan SOP adalah meminimalisir waktu yang digunakan, dimana SOP seringkali dibutuhkan karena suatu masalah dari sumber daya. Aspek kedua dari struktur birokrasi yang akan kita perhatikan adalah fragmentasi. fragmentasi adalah dispersi dari tanggung jawab untuk area kebijakan antara beberapa unit organisasi. 110 Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. struktur birokrasi yang terfragmentasi (Soeharsono et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan didapatkan bahwa struktur organisasi sudah berjalan dengan sesuai dengan prosedur dengan struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dan tiga bidang yang terdiri dari bidang umum, bidang PTL/limbah penataan, dan tata lingkungan bidang kebersihan. Kebijakan tentang penanganan sampah sudah berjalan dengan baik salah satunya seperti kebijakan pengelolaan persampahan adalah turunan terkait dengan turunan Qanun No. 4 tahun 2017 itu menyangkut perizinan pengelolaan kegiatan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk penanganan sampah yang semakin kompleks di daerah tersebut. Qanun ini menjadi kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah, pengangkutan, hingga pembuangan akhir.

Berjalan dengan baiknya indikator struktur dan organisasi ini dalam penanganan sampah merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan capaian keberhasilan dalam penanganan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kamarosisam (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan penting antara struktur organisasi dan pengelolaan limbah kontstruksi di konatruksi perusahaan yang ada di pahang. Struktur organisasi dan pengelolaan limbah ditemukan terkait secara positif sebagai dampak dari struktur organisasi yang sudah berjalan dengan baik(Kamarosisam et al., 2021). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al yang menyatakan bahwa faktor pendukung dalam

implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah struktur birokrasi yang sudah dapat berjalan dengan baik (Ramadhan et al., 2019).

Analisis Implementasi Disposisi Dalam Penanganan Sampah

Menurut Winarno (2019), sikap/disposisi pelaksana merupakan indikator penting lain dalam suatu proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan disposisi sikap yang positif untuk melaksanakan suatu kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, apa bila implementor memiliki disposisi yang baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan didapatkan bahwa, pada indikator disposisi sudah berjalan dengan baik dan penerapannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan tidak ada kendala karena semua armada dan tenaga kerja sudah diatur sesuai jalur prosedur dan rutennya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerja yang berada dilapangan dapat tersebar keseluruh lokasi yang berbeda.

Terberdayanya disposisi dengan baik sangat berpengaruh baik dalam memaksimalkan penanganan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al yang menyatakan bahwa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah disposisi yang sudah dapat berjalan dengan baik (Ramadhan et al., 2019).

Analisis Implementasi Komunikasi Dalam Penanganan Sampah

Komunikasi merupakan suatu hal yang paling penting dan merupakan aspek yang paling kompleks dalam hubungan kehidupan manusia. Karena itu komunikasi sangat vital untuk kehidupan bermasyarakat karena sangat dipengaruhi oleh pesan-pesan yang diterima dari orang lain yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu (Syaroh & Lubis, 2020). Penanganan sampah juga sangat membutuhkan aspek komunikasi yang baik sehingga suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik dan benar

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan didapatkan bahwa, dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penanganan sampah masih terdapat kendala seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Masyarakat masih banyak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan Hal ini yang menjadi kendala dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanganan sampah.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan penanganan sampah adalah dilihat dari seberapa jauh masyarakat mendukung kebijakan tersebut dengan tingkat kesadaran dan tindakan yang mendukung, jika masyarakat masih belum sepenuhnya sadar akan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut belum berhasil. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soeharsono et al (2023) yang menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bogor masih terhambat dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk memilah sampah dari sumbernya (Soeharsono et al., 2023).

Analisis Implementasi Sarana Prasarana Dalam Penanganan Sampah

Sarana prasarana adalah fasilitas berupa benda – benda yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai (Firmasyah, 2020). Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada indikator sarana prasarana didapatkan bahwa, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat masih kurang dan pada fasilitas armada. Secara kelengkapan mungkin sudah melengkapi berdasarkan aspek kebutuhan alat namun secara jumlah masih diperlukan untuk lebih banyak sehingga memudahkan petugas dalam kecepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan dimana jumlah tong sampah ada 4 unit, 22 konteiner dan mobil armada trek 18 unit.

Ketersediaan sarana prasarana yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah. Namun begitu juga sebaliknya sehingga keduanya harus sejalan (Zulkifli AK, Ramadhaniah, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi & Adam yang menyatakan bahwa keterbatasan armada pengangkut sampah, dan bak sampah yang tidak tersebar secara merata mempengaruhi pengolahan sampah di masyarakat, sehingga meskipun mereka mengerti dengan keterbatasan sarana prasarana membuat tingkat kesadaran masyarakat menurun (Hardi & Adam, 2019). Didukung oleh penelitian Agustin et al yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan prasarana dengan pengelolaan sampah (Agustin et al., 2022).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2019) berpendapat, adanya undang-undang menugaskan badan pelaksana untuk bertanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber agar implementasi berjalan dengan lancar, misalnya personil

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan didapatkan bahwa, implementasi kebijakan pemerintah kegiatan pemilahan sampah telah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tidak lagi sampah anorganik di tempat pembuangan akhir di Kecamatan Johan Pahlawan. Adanya kebijakan pemilahan sampah sangat mempermudah pemulung untuk mengumpulkan sampah plastik dan membantu mendorong perekonomian bagi pemulung dengan mudah sehingga implementasi pengurangan sampah anorganik di kecamatan Johan Pahlawan semakin baik.

Apabila sumber daya baik maka implementasi kebijakan juga baik, hal ini menyatakan bahwa sumber daya sangat berpengaruh besar terhadap implementasi sebuah kebijakan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soedarto (2023) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara sumber daya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten kudu sebesar 39% (Soeharsono et al., 2023).

Adapun peran Pemerintah sebagai pengawas utama dalam pengelolaan sampah adalah sebagai pemilik aturan yang telah dibuat dan disepakati. Pengawasan dan pengontrolan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Pengawasan juga dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan pengawasan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya (Syahputra, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari indikator yang telah dianalisis yaitu struktur organisasi, disposisi, sarana prasarana dan komunikasi di dapatkan bahwa bahwa indikator struktur organisasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dan tiga bidang yang terdiri dari bidang umum, bidang PTL/limbah penataan, dan tata lingkungan bidang kebersihan. Kebijakan

tentang penanganan sampah sudah berjalan dengan baik Qanun No. 4 tahun 2017. Pada indikator disposisi sudah berjalan dengan baik dan penerapannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku, semua armada dan tenaga kerja sudah diatur sesuai jalur prosedur dan rutanya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerja. Pada indikator komunikasi belum berjalan secara maksimal karena dalam mengimplementasikan kebijakan masih terdapat kendala seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pemerintah karena masih membuang sampah sembarangan. Pada indikator sarana dan prasarana, belum berjalan secara maksimal karena kekurangan pada fasilitas armada masih diperlukan untuk lebih banyak sehingga memudahkan petugas dalam kecepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Saran

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, pada indikator sarana prasarana agar dapat menambah jumlah fasilitas berupa armada di Dinas Lingkungan Hidup untuk mempermudah petugas menjalankan tugasnya terkhusus pada saat dilapangan agar berjalan dengan baik dalam penanganan sampah di kecamatan Johan Pahlawan dengan tercukupinya sarana tersebut masyarakat akan berpartisipasi dalam menunjang penanganan sampah di Kecamatan Johan Pahlawan dengan melakukan implementasi membuang sampah pada tempatnya untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan sesuai tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada indikator komunikasi agar Dinas Lingkungan Hidup di Aceh Barat lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi yang rutin tentang penanggulangan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan lingkungan. Pada indikator struktur organisasi diharapkan dapat memperat hubungan setiap bidang demi menciptakan kinerja yang nyaman dan lebih baik lagi, sedangkan pada indikator disposisi diharapkan semakin ditingkatkan lagi dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. F., Nurlailia, A., & Sulistyorini, L. (2022). Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Ketersediaan Sarana dengan Tindakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Serta Dampaknya Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 335–346.
- Syahputra, Andi (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kesehatan Tembusai*, 5 (4), 1–20.
- Chandra, Budiman. (2017). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat. (2023). *Data Jumlah Sampah di Aceh Barat (2023) Aceh Barat*.
- Dinas Lingkungan Hidup Aceh. (2023). *Data Jumlah Sampah di Indonesia (2023) Aceh*.
- Dinas Lingkungan Hidup Indonesia. (2023) *Data Jumlah Sampah di Indonesia (2023) Jakarta*.
- Damanhuri Enri, P. T. (2021). *Pengelolaan Sampah*. Diktat Kuliah TL-3104. Bandung.
- Fridawaty, T., Gunawan, K., Rizal, A., & Andriani, C. Y. (2024). Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(2), 147–157. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh.
- Firmasyah, K. (2020). Hubungan Sarana Prasarana dan Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, (2008) 27–48. <http://repository.ump.ac.id/8213/>
- Hardi, H., & Adam, R. P. (2019). Sampah Di Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Katalogis*, 5(9), 145–150.
- Kamarosisam, F., Adeleke, A. Q., & Taiwo, T. T. (2021). Role of Organizational Structure on

- Construction Waste Management Among Kuantan Malaysian Construction Industries. *International Journal of Engineering Science Technologies*, 5(3), 57–73. <https://doi.org/10.29121/ijoest.v5.i3.2021.199>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Ramadhan, G., Nurcahyanto, H., & Yuniningsih, T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI Oleh. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 1–23.
- Ponisri, P., & Soekamto, M. H. (2020). Pemanfaatan Limbah Anorganik Untuk Penataan Taman Di Kelurahan Malawe. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 2(1), 23–29. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v2i1.810>
- Purnomo, C. W. (2021). *Solusi pengelolaan sampah Kota*. UGM Press.
- Rosyidie, A. (2019). Pembangunan Kota Berkelanjutan: Belajar dari Curitiba. In *Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah* (Vol. 15, Issue 3, pp. 16–31). <https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4287>
- Saftha, D., Salim, K., Kustono, D., & Al-irsyad, M. (2024). Hubungan Pengetahuan , Ketersediaan Sarana Prasarana Dan Kebijakan Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Mengelola Sampah Di Pasar Sayur Kota Batu. 6(2), 218–228. <https://doi.org/10.17977/um062v6i22024p218-228>
- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1798>
- Syaroh, M., & Lubis, I. (2020). Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Siswa Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Jurnal Network Media*, Vol: 3 No.(1), 95–101.
- Winarno, (2019) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi. Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo
- Yunianti, M. N. (2023). Perbedaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Berkaitan Dengan Implementasi Usaha Kesehatan Sekolah Di Di Sdn 1 Apitaik Dan Sdn 2 Apitaik. *Journal Transformation of Mandalika*, 5(1), 67.
- Zuraidah, Z., Rosyidah, L. N., & Zulfi, R. F. (2022). Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6547>
- Zulkifli AK, Ramadhaniah, S. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Gampong Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Sabang Tahun 2022. *Journal of Health and Medical Science*, 2, 205–214. <https://doi.org/10.51178/jhms.v2i1.1211>.